

Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kabupaten Pasaman

Rahmi Fauzia^{1*}, Perengki Susanto²

^{1, 2} Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim

ABSTRACT

This research aims to identify the factors hindering the completion of follow-up actions on the recommendations of the Supreme Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK) in Pasaman Regency. A quantitative approach was utilized, and data were collected through questionnaires administered to key personnel involved in the follow-up activities in 37 government departments in Pasaman Regency. The findings revealed seven factors influencing the implementation of follow-up actions on BPK's recommendations, namely Technical and Coordination Factors, Leadership Factors, Civil Servants (ASN) and Non-Civil Servants and Third Parties Factors, Human Resources (HR) and Work Environment Factors, Non-Compliance Factors, Follow-Up Monitoring Factors, and Socialization Factors. The dominant hindering factor was identified as the Socialization Factor, with an average variable score of 4.55. In light of these findings, strategies to improve performance and enhance the completion of follow-up actions on BPK's recommendations were proposed. These include continuous monitoring and the support of the Inspectorate team in addressing findings and BPK's recommendations, revising and evaluating existing Standard Operating Procedures (SOPs) in the field, as well as conducting comprehensive socialization and clarification of regulations for all stakeholders involved. This research contributes valuable insights for Pasaman Regency and other local governments in strengthening their Internal Control Systems (ICS), particularly in financial management, and for the Inspectorate to optimize their role in facilitating follow-up actions. Future studies should consider expanding the theoretical framework to better comprehend the influence of identified factors in the follow-up process. The conclusion and recommendations from this study are expected to be beneficial for all stakeholders involved in completing follow-up actions on BPK's recommendations in Pasaman Regency and serve as a foundation for further research in this area.

Keywords:

Strategic Management, BPK, POAC, Hindering Factors, Local Government

✉ Corresponding author :

Email Address : alifahts@gmail.com

1. Pendahuluan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP No 12 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (PP No. 8 Tahun 2006), Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel dalam laporan keuangan.

Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan para pengguna laporan maka laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh BPK RI. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah menjadi salah satu hal yang penting untuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil penelitian (Agusti, 2014), dan Setyaningrum menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit artinya semakin besar temuan audit maka peluang dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena temuan yang material akan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan yang menyebabkan salah saji sehingga opini menjadi semakin buruk (Sari et al., 2015).

Pasal 21 ayat (1) pada (UU No.15 Tahun 2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh setiap Entitas audit dan opini yang diberikan menjadi acuan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Rekomendasi juga merupakan saran atas berbagai kekurangan / kelemahan yang terjadi pada program / aktivitas yang diaudit.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan kepada BPK untuk memberikan rekomendasi evaluatif, penilaian opini, dan pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menjadi mutlak untuk segera dilaksanakan oleh entitas audit sebagai bentuk/ umpan balik atas pelaksanaan audit serta sebagai langkah awal dalam rangka pengelolaan keuangan negara/ daerah yang transparan dan akuntabel, semakin sedikit temuan audit yang dikeluarkan BPK maka semakin besarlah peluang daerah untuk mendapatkan Opini WTP.

Setiap tahunnya BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, BPK akan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/ rekomendasi BPK. Salah satu pemerintah daerah yang masih memiliki masalah terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada pemeriksaan tahun 2005-2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK tahun 2022 mengungkapkan data temuan sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

Tabel 1 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

No.	Tahun 2005 S/D 2022	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa Rekomendasi
1	LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	237	601	427	174
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	59	158	110	48
3	Audit Kinerja	56	145	87	58
Jumlah		352	904	624	280

Berdasarkan tabel di atas mengungkapkan bahwa Kabupaten Pasaman memiliki 352 temuan dan 904 rekomendasi. Dari jumlah tersebut Kabupaten Pasaman telah menindaklanjuti sebanyak 624 rekomendasi. Masih terdapat 280 rekomendasi yang belum sesuai, dan 19 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dari data IHPS 2022 semester I, Pemerintah Kabupaten Pasaman belum maksimal menindaklanjuti semua rekomendasi baik dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan Laporan Kinerja sejak pemeriksaan tahun 2006 s/d 2022. Persentase tindak lanjut baru mencapai 70,24% (pemantauan 12 April 2023). Dan angka persentase ini adalah capaian angka yang rendah dibandingkan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pasaman belum maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hasil ini adalah kumulatif dari tindak lanjut yang masih belum sesuai dengan rekomendasi BPK sejak tahun 2005. Melihat dari pencapaian yang masih rendah ini, peneliti tertarik untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan bukti empiris berupa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab lambatnya proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Beberapa yang menjadi perhatian, pengamatan dan kesimpulan sementara bagi peneliti yang menjadi penyebab dominan lambatnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah sanksi yang kurang tegas, terjadinya rotasi dan mutasi, pengawasan DPRD yang lemah, ketidakseriusan APIP (Inspektorat) untuk berkontribusi melakukan pendampingan percepatan tindak lanjut kepada perangkat daerah maupun ASN yang terlibat, tidak responsifnya pihak ketiga (Kontraktor) serta lambatnya verifikasi kebenaran hasil tindak lanjut oleh BPK sendiri dalam hal ini pada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Menurut Vina Vitriana Rudji dalam jurnalnya (Rudji, 2018), faktor-faktor yang memengaruhi lambatnya penyelesaian tindak lanjut, di antaranya: kurangnya pegawai yang berkompentensi, belum adanya sanksi yang tegas, belum adanya koordinasi antar SKPD, adanya perubahan struktur organisasi (mutasi), penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap penyelesaian TLRHP, dan belum ada komitmen pimpinan, serta rekomendasi yang tidak jelas oleh auditor. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan acuan baku dalam menilai tidak optimalnya penyelesaian tindak lanjut pada suatu pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian (Masyitoh et al., 2015) menunjukkan bahwa semakin besar Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah akan

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

menurunkan persepsi korupsi. Penyelesaian rekomendasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menghambat dan menentukan keberhasilan TLHP. Faktor-faktor tersebut merupakan rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan dipengaruhi membentuk suatu sistem yang terdiri dari input, proses, output (Usman, 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab lambatnya proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di daerah tersebut. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan dan tantangan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi masalah dan memperbaiki sistem pengendalian internal serta akuntabilitas keuangan negara/daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan Keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (UU No.15 Tahun 2006). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan daerah. Ketentuan tentang pemeriksaan oleh BPK diatur dalam (UU No.15 Tahun 2004) tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.(UU No.15 Tahun 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU No.15 Tahun 2004), Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya (temuan), yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

Laporan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dalam laporan pemeriksaan menunjukkan kualitas dari laporan hasil pemeriksaan dan menjadi efektif jika rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang diperiksa (Dwiputrianti, 2008).

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

Manajemen Strategi

Menurut (Jauch Lawrence R. & Glueck William F, 2011), strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Definisi strategi menurut (Salusu, 2006), strategi diartikan sebagai seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Manajemen menurut George & Terry tahun 2013 (Terry, 2013) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi, dan pengawasan kegiatan/usaha secara sistematis dan efektif oleh para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara sederhana, Manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni perencanaan, mengatur, pengarahan, dan pengawasan yang dinamis yang menggerakkan organisasi mencapai tujuannya.

Tabel 2 Variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Kabupaten Pasaman berdasarkan penelitian terdahulu dan menurut *Expert*

No	Variabel	Sumber
1	Komitmen Pimpinan yang masih kurang	Josmar (2021)
2	Sanksi belum diterapkan dengan tegas	Sugih Sutrisno (2021)
3	Pengaruh masa jabatan Kepala Daerah	Lestari (2022), Aurora (2021)
4	Pengawasan legislatif yang masih kurang	Akbar (2015), Lestari (2022)
5	Kesalahpahaman persepsi antara pemeriksa dengan entitas	Essing et al.,(2017)
6	Temuan administratif dan keuangan (material)	Suryanto (2016)
7	Penerapan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang masih lemah pada SKPD	Putra & Sentosa (2021), Pongoliu et al.,(2017)
8	Keterlambatan menindaklanjuti temuan	Suryanto (2016)
9	Kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	Essing et al.,(2017)
10	Proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan SOP	Essing et al.,(2017)
11	Koordinasi yang belum maksimal	Sugih Sutrisno (2021)
12	Akses Informasi temuan kurang optimal	Akbar (2015)
13	Kekurangan SDM	Nurdiana (2022), Putra & Sentosa (2021), Essing et al.,(2017), Banjar Nahor et al.,(2021)
14	Lingkungan Kerja non fisik belum optimal	Banjar Nahor et al.,(2021)
15	Budaya Kerja yang belum optimal	Banjar Nahor et al.,(2021)
16	Penerapan Aplikasi SIPTL yang masih kurang efektif	Friska Ramadanty Sasmito (2020)
17	Kecakapan auditor yang masih kurang	Lestari (2022), Aurora (2021)
18	Terjadinya Mutasi dan Rotasi ASN	Putra & Sentosa (2021), Pongoliu et al., (2017)
19	Pihak ketiga yang tidak <i>responsive</i> mempengaruhi tindak lanjut	Putra & Sentosa (2021), Pongoliu et al., (2017)

No	Variabel	Sumber
20	Pembayaran yang menyicil melewati waktu yang ditentukan	Essing et al.,(2017)
21	Tingkat kesulitan menindak lanjut	Essing et al.,(2017)
22	ASN yang terlibat temuan sudah pensiun dan meninggal	Pongoliu et al., (2017)
23	Volume beban kerja OPD	Inspektur dan Tim Tindak Lanjut Inspektorat Kab. Pasaman (2023)
24	Pengembalian kerugian daerah (keruda)	
25	Pelaksanaan TGR yang kurang maksimal	
26	Sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan tindak lanjut	
27	Pemberian Surat peringatan 1 dan 2	
28	Bahan tindak lanjut Rekomendasi yang belum diverifikasi	
29	Pendampingan tindak lanjut oleh Inspektorat	
30	Tenaga non ASN (tenaga Kontrak) yang tidak <i>responsive</i> mempengaruhi tindak lanjut	

3. Metoda, Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Responden yang dipilih adalah Kepala OPD, Sekretaris OPD, dan Koordinator Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada 37 OPD di Kabupaten Pasaman. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan alasan bahwa pemilihan informan didasarkan atas kemampuannya dalam memberikan data yang akurat. Jumlah sampel yang diambil adalah 111 orang yang mewakili 37 OPD dengan masing-masing perwakilan OPD terdiri dari 3 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Sebelumnya, peneliti memberikan pengarahan kepada responden tentang cara mengisi kuesioner. Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah menggunakan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) untuk mendapatkan persentase faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Pada penelitian ini akan menggabungkan beberapa teknik analisis, yaitu Relative Importance Index (RII), Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan metode POAC (Penentuan Obyek Analisis).

- Relative Importance Index (RII):

Pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman, peneliti akan menggunakan angket kuesioner yang telah disebarakan kepada responden terkait (Kepala OPD, Sekretaris OPD, dan Koordinator Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada 37 OPD di Kabupaten Pasaman). Setelah data terkumpul, akan dihitung Relative Importance Index (RII) dari masing-masing faktor yang diidentifikasi dalam pertanyaan kuesioner. RII digunakan untuk mengukur seberapa penting setiap faktor dalam mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

- Exploratory Factor Analysis (EFA):

Setelah mendapatkan hasil dari RII, peneliti akan menggunakan teknik Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk mengelompokkan faktor-faktor yang memiliki korelasi tinggi menjadi beberapa faktor latent atau variabel laten yang lebih mendasari. EFA akan membantu dalam mereduksi kompleksitas data dan membantu dalam

mengidentifikasi pola-pola atau kelompok-kelompok faktor penyebab penghambat penyelesaian tindak lanjut.

- **Confirmatory Factor Analysis (CFA):**
Selanjutnya, peneliti akan menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji validitas dan reliabilitas dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi melalui EFA. CFA akan membantu untuk memastikan bahwa faktor-faktor yang diidentifikasi benar-benar mewakili konstruk yang diinginkan dan sesuai dengan data yang ada.
- **Metode POAC :**
Metode POAC akan digunakan untuk mengelompokkan responden ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Misalnya, POAC dapat digunakan untuk mengelompokkan responden berdasarkan tingkat tanggung jawab, lama pengalaman kerja, atau peran dalam proses tindak lanjut.

Selanjutnya, hasil dari analisis RII, EFA, CFA, dan metode POAC akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab penghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di daerah tersebut, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi masalah dan memperbaiki sistem pengendalian internal serta akuntabilitas keuangan negara/daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil *Relative Importance Index* (RII)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui urutan peringkat variabel-variabel yang menjadi penyebab hambatan di dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman. Berikut hasil RII di jelaskan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil *Relative Importance Index*

Kode	Variabel	RII	Ranking
X10	Pengembalian kerugian daerah (keruda) yang masih rendah	0,913	1
X11	Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kurang maksimal	0,899	2
X6	Kesalahpahaman persepsi antara pemeriksa dengan entitas	0,893	3
X3	Pengaruh masa jabatan Kepala Daerah	0,891	4
X12	Pemberian Surat peringatan 1 dan 2 kepada entitas	0,889	5
X22	Budaya Kerja yang belum optimal	0,889	6
X29	Pihak ketiga (Kontraktor) yang tidak responsif	0,887	7
X2	Sanksi belum diterapkan dengan tegas	0,883	8
X7	Temuan administratif dan keuangan (material)	0,883	9
X18	Volume beban kerja OPD	0,883	10
X23	Penerapan Aplikasi SIPTL yang belum efektif	0,883	11
X17	Akses Informasi temuan kurang Optimal	0,881	12

Kode	Variabel	RII	Ranking
X28	ASN yang terlibat temuan sudah pensiun dan meninggal	0.881	13
X20	Kekurangan SDM	0.877	14
X21	Lingkungan Kerja non fisik belum optimal	0.877	15
X1	Komitmen Pimpinan yang masih kurang	0.875	16
X16	Koordinasi yang belum maksimal	0.875	17
X13	Keterlambatan menindaklanjuti temuan	0.873	18
X8	Pembayaran yang menyicil melewati waktu yang ditentukan	0.871	19
X19	Sosialisasi peraturan tindak lanjut belum maksimal	0.871	20
X5	Bahan tindak lanjut Rekomendasi yang belum diverifikasi BPK	0.869	21
X15	Proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan SOP	0.867	22
X30	Tenaga non ASN (tenaga Kontrak) memiliki temuan tidak responsif	0.867	23
X9	Penerapan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang masih lemah pada OPD	0.863	24
X27	Terjadinya mutasi dan rotasi ASN	0.861	25
X24	Tingkat kesulitan menindaklanjuti rekomendasi	0.859	26
X14	Kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	0.855	27
X4	Pengawasan legislatif yang masih kurang	0.853	28
X26	Pendampingan tim tindak lanjut Inspektorat	0.853	29
X25	Kecakapan Auditor yang masih kurang maksimal	0.840	30

Sumber: Pengolahan Data RII

Dari hasil analisis RII didapat hasil bahwa variabel yang menjadi penyebab/ hambatan yang paling tinggi di dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman yaitu pengembalian kerugian daerah (keruda) yang masih rendah, yang kedua yaitu Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang kurang maksimal dan yang ketiga Kesalahpahaman persepsi antara pemeriksa dengan entitas.

4.2. Hasil Exploratory Factor Analysis (EFA)

Dari hasil analisis uji prasyarat menggunakan uji validitas dari 30 (tiga puluh) variabel semuanya valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga untuk tahapan analisis berikutnya jumlah variabel yang digunakan yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) variabel. Untuk uji prasyarat reliabilitas didapat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,829 atau lebih besar dari 0,6, yang menyimpulkan bahwa terdapat konsistensi data penelitian yang digunakan.

Dari 30 (tiga puluh) variabel yang telah memenuhi uji prasyarat dilanjutkan dengan melakukan *Exploratory Factor Analysis* menggunakan analisis faktor, dimana hal ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang diduga memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan mengeksplorasi indikator yang ada untuk pengelompokan variabel

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

baru. Dari tahapan yang dilakukan dalam analisis ini, untuk uji KMO telah memenuhi syarat dengan nilai KMO 0,720 atau besar dari 0,5 dan Bartlett's 0,000 atau kecil dari 0,005 sehingga dinyatakan terdapat kelayakan variabel yang digunakan untuk proses analisis. Untuk *anti image matrices* dari 30 (tiga puluh) yang digunakan hanya terdapat 28 (dua puluh delapan) variabel dengan nilai MSA besar dar 0,5 dan yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis. Untuk 28 (dua puluh delapan) variabel tersebut melalui uji *communalities* dinyatakan semua variabel memenuhi syarat dengan nilai extraction lebih besar dari 0,5, sehingga proses analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dengan tahapan analisis berikutnya menggunakan 28 variabel yang telah memenuhi syarat, melalui tabel *total variance explained* dapat dibentuk 8 faktor hasil analisis, hal ini juga dibuktikan berdasarkan grafik *scree plot* yang menunjukkan terdapat 8 titik yang memiliki nilai *eigenvalue* lebih besar dari 1 (satu), sehingga dapat disimpulkan dari proses analisis ini dapat dibentuk 8 faktor hasil analisis. Dari 8 faktor yang dibentuk dilihat kembali korelasi antar variabel yang dibentuk menggunakan *component matrik*, lalu dilanjutkan dengan mengklasifikasikan variabel yang masuk kedalam faktor yang terbentuk menggunakan *rotated component matrix* dan dari tahapan ini ditentukan nama faktor hasil klasifikasi variabel. Dari faktor yang terbentuk ini dengan menggunakan *component transformation matrix* dapat disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk layak untuk merangkum 28 (dua puluh delapan) variabel yang dianalisis.

4.3. *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*

Dari tahapan pengujian, maka setiap hasil uji yang direkapitulasi pada tabel berikut:

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Faktor Confirmatory

Faktor	Var	Val	Rel	KMO	Bartlett's	Loading Faktor	Mean	Rangking
Teknis dan Koordinasi (F1)	X14	0.750				0.777	4.28	5
	X15	0.769				0.769	4.34	4
	X16	0.788	0.794	0.814	0.000	0.758	4.38	3
	X17	0.665				0.768	4.41	2
	X18	0.725				0.852	4.42	1
Mean						4.36		
Kepemimpinan (F2)	X1	0.773				0.852	4.38	3
	X2	0.770	0.765	0.732	0.000	0.697	4.42	2
	X3	0.737				0.770	4.46	1
	X4	0.789				0.807	4.27	4
Mean						4.38		
ASN, Non ASN dan Pihak Ketiga (F3)	X27	0.786				0.879	4.31	4
	X28	0.748	0.757	0.714	0.000	0.599	4.41	2
	X29	0.796				0.719	4.44	1
	X30	0.712				0.759	4.34	3

Mean							4.37	
	X20	0.747				0.790	4.39	2
SDM dan Lingkungan Kerja (F4)	X21	0.793	0.747	0.742	0.000	0.657	4.39	2
	X22	0.801				0.733	4.45	1
	X24	0.682				0.438	4.30	3
Mean							4.38	
	X7	0.714				0.756	4.42	1
Ketidapatuhan (F5)	X8	0.733	0.69	0.723	0.000	0.775	4.36	3
	X9	0.790				0.796	4.32	4
	X13	0.657				0.615	4.37	2
Mean							4.36	
	X5	0.646				0.619	4.35	2
Pemantauan Tindak Lanjut (F6)	X6	0.761	0.716	0.698	0.000	0.873	4.47	1
	X25	0.781				0.873	4.20	4
	X26	0.745				0.793	4.27	3
Mean							4.32	
Pengembalian kerugian daerah (F7)	X10	-	-	-	-	-	4.56	1
	X19	0.863	0.648	0.501	0.000	0.751	4.50	2
Sosialisasi (F8)	X23	0.857				0.802	4.60	1
Mean							4.55	

Dari tabel tersebut diperoleh hasil dari setiap tahapan pengujian, dimana untuk uji validitas semua variabel dari 7 faktor analisis dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan untuk uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* berada diatas 0,6 yang masuk kedalam kategori data dengan interpretasi andal dan sangat andal. Untuk mengetahui korelasi variabel terhadap faktornya juga telah dibuktikan melalui uji KMO dan Bartlett's dimana hasil nilai KMO setiap faktor lebih besar dari 0,5 dan nilai Bartlett's kecil dari 0,005. Untuk nilai loading faktor setiap variabel terhadap faktornya pun telah memenuhi syarat dengan nilai loading faktor lebih besar dari 0,5. Dari tahapan uji ini dinyatakan bahwa 7 faktor analisis telah memenuhi syarat konfirmatori sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman.

Untuk menentukan faktor dominan yaitu berdasarkan nilai rata-rata variabel pembentuk dari faktor yang telah di analisis, dengan nilai rata-rata yang dimaksud yaitu: faktor Teknis dan Koordinasi (4,36), Kepemimpinan (4,38), ASN, Non ASN dan Pihak Ketiga (4,37), SDM dan Lingkungan Kerja (4,38), Ketidapatuhan (4,36), Pemantauan Tindak Lanjut (4,32), dan Sosialisasi (4,55), sehingga yang menjadi faktor dominan adalah faktor Sosialisasi dengan nilai

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

rata-rata variabel pembentuk faktor analisisnya sebesar 4,55. Variabel dalam faktor dominan ini sendiri meliputi Sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan tindak lanjut (X19) dan Penerapan Aplikasi SIPTL yang belum efektif (X23).

4.4. Rencana Strategi POAC

Berdasarkan dari hasil di atas diperoleh faktor dominan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman yaitu faktor Sosialisasi. Dari permasalahan tersebut, maka salah satu langkah atau solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun rencana yang komprehensif untuk peningkatan kinerja dan meminimalisir penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman tersebut. Salah satu metoda yang dapat digunakan adalah pendekatan yang dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, Actuating and Controlling*). Berdasarkan pendekatan tersebut, beberapa rencana yang dikembangkan sesuai dengan faktor hasil analisis dapat dirumuskan pada tabel 5 berikut :

Tabel 4.33. Strategi POAC

Faktor	Planning	Organizing	Actuating	Controlling
Teknis dan Koordinasi (F1)	Menyusun target dan menentukan metode teknis dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Membentuk tim khusus dalam teknis pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	- Menerapkan teknis dan koordinasi yang baik sesuai SOP yang antar pihak yang terlibat - Memberikan pemahaman kepada entitas mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembenahan teknis dan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
Kepemimpinan (F2)	Merencanakan peningkatan Komitmen organisasi dan ketegasan kepemimpinan dalam penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Melakukan pertemuan berkala dengan pimpinan SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan Pengawasan kepemimpinan dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	- Melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan dalam pelaksanaan tindak lanjut

		BPK			
ASN, ASN dan pihak (F3)	Non dan Ketiga	Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam pembinaan ASN, Non ASN serta mengefektikan kesepakatan dengan pihak ketiga untuk penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan ASN, Non ASN dan pihak ketiga dalam pelaksanaan tindak lanjut	Melakukan perbaikan dalam pembinaan ASN, Non ASN dan kesepakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan evaluasi pembinaan ASN, Non ASN dan kesepakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
SDM dan Lingkungan kerja (F4)		Menyusun sasaran peningkatan Kapasitas SDM dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut dan merencanakan lingkungan kerja yang kondusif	Melakukan pembagian tugas bagi masing-masing individu yang dilibatkan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap individu	Melakukan evaluasi kinerja SDM dan lingkungan kerja dalam pelaksanaan tindak lanjut
Ketidapatuhan (F5)		Merencanakan pelaksanaan pengawasan aktif dan pasif secara berkala	Mengelola identifikasi risiko dalam meminimalisir temuan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembenahan apabila terdapat suatu permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemantauan Tindak Lanjut (F6)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar pemantauan tindak lanjut yang lebih efektif - Merencanakan pelaksanaan status 4 (empat) pada temuan dan rekomendasi yang tidak relevan. 	Melakukan penelaahan temuan dan rekomendasi dalam penyamaan persepsi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendampingan kepada entitas secara aktif dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK - Menginventarisir temuan dan rekomendasi yang tidak relevan untuk dilaksanakan status 4 (empat). 	Melakukan evaluasi dan monitoring pemantauan tindak lanjut
Sosialisasi (F8)	Merencanakan sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan tindak lanjut	Melaksanakan sosialisasi dan gelar pengawasan secara periodik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan perbaikan terhadap Sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan tindak lanjut	Monitoring dan evaluasi terhadap Sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan tindak lanjut

Berdasarkan tabel strategi POAC, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meminimalisir hambatan dalam kegiatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman, perlu dilakukan langkah atau upaya dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan mengadakan yang diantaranya melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait, Pemantauan tindak lanjut, dan Sosialisasi peraturan tindak lanjut. Pendampingan yang aktif dari tim tindak lanjut Inspektorat kepada pihak-pihak yang terlibat temuan rekomendasi secara persuasif dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut di Kabupaten Pasaman.

Permasalahan yang kerap muncul yaitu kurangnya evaluasi dan tidak sinkronnya penghargaan yang diterima berupa penerimaan WTP (wajar tanpa pengecualian) dengan progres tindak lanjut di Kabupaten Pasaman, dimana kondisi yang terjadi yaitu progres tindak lanjut kecil dan WTP (wajar tanpa pengecualian) telah diperoleh secara terus menerus sebanyak 10x sejak tahun 2013. Kemudian proses tindak lanjut yang ada di Pasaman tergolong lemah dibandingkan dengan progres tindak lanjut kabupaten / Kota yang ada di Sumatera Barat.

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan....

Semua kegiatan yang dilaksanakan perlu adanya pengendalian atau dalam istilah *controlling*. Hal yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu melakukan *monitoring* dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan pembenahan apabila terdapat suatu permasalahan agar kendala yang menjadi penghambat dalam kegiatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman, *controlling* dapat meminimalisir kendala dalam kegiatan tindak lanjut dan program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman, dengan faktor Sosialisasi sebagai faktor penghambat paling dominan. Strategi untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian tindak lanjut adalah melaksanakan pemantauan dan pendampingan tim Inspektorat, merancang dan mengevaluasi SOP di lapangan, serta melakukan sosialisasi dan penjelasan peraturan kepada semua stakeholder. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan daerah dan peran Inspektorat untuk lebih optimal dalam memfasilitasi OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas konsep teoritis dan mendalami pengaruh faktor analisis dalam pelaksanaan tindak lanjut. Diharapkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Pasaman dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Reference

- Agusti, A. F. (2014). *Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga*. https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hilda.rosieta/publication/2014-_iv.pdf
- Akbar, B. . (2015). *Tindak, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Di, Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Indonesia*. *Skripsi. Universitas Brahwijaya*.
- Andrew, M. (2019). *Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan Building Information Modeling*. 2(1), 27–36.
- Aurora, T. K. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. *Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Badriyah, L. (2019). *Gambaran Faktor Ketidapatuhan Program Diet Pada Klien Diabetes Melitus . Malang*. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang*. Hal. 5. 14. 14–43.
- Banjar Nahor, J. L., Adriani, A., & Nor, W. (2021). *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Apip Inspektorat Kabupaten Barito Timur*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i1.3447>
- BPKP. (2014). *Manajemen Pemerintah Daerah* (BPKP (ed.); e-Learning). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Dwiputrianti, S. (2008). *Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia*. 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v5i4.442>Septiana Dwiputrianti
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 118–128.

- Friska Ramadanty Sasmito, M. S. dan A. S. (2020). *Analisis Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Efektivitas LHP BPK RI*. 21(1), 1-9.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. J. et al. (2010). *Multivariate Data Analysis* (Pearson Education Limited (ed.); 7 th). Harlow
- Irawaty A. Kahar. (2008). Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi, Vol.4, No.(1)*, 1-7.
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. (2011). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan*. Erlangga.
- Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. *Owner, 6(4)*, 3553-3565. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1171>
- Marliani, L., & Djadjuli, R. D. (2019). Menakar Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Di Era Globalisasi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 10(2)*, 74. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1654>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, April 2019*, 1-26.
- Nurdiana. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. *Tesis. Universitas Hasanuddin*.
- Perbup 41/2017. (n.d.). *Perbup Nomor 41 tahun 2017.Pdf*.
- Pongoliu, Rahmi Ramadhan Saerang David Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8(1)*, 1-10. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254>
- PP 38, 2016. (2016). *Pp 38 Tahun 2016*.
- PP No. 8 Tahun 2006. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*.
- PP No 12 Tahun 2019. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum, 184*.
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank, 6(1)*, 120-128. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879>
- Rudji, V. V. (2018). *Faktor Penyebab Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (Studi Pada Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat)*.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan *Jurnal Nasional Akuntansi XVIII, September*.
- Shulthoni, M. (2017). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, 951-952., 6(1), 2013-2015.
- Siti Anom, S. S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kepaduan Tim Terhadap Keefektifan Tim Kerja Pppptk Medan. *Jurnal Prointegrita, 4(1)*, 219-229. <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.584>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (E. Sutopo (ed.)). ALFABETA, cv.

- Suryanto, A. (2016). Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta Dan Implementasi Manajerial. *Interdisciplinary Postgraduate Student Conference*, 1, 83-90. http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/11-AGUS_SURYANTO.pdf
- Syukriy, A., & Andra, A. J. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 23-26.
- Terry, G. R. (2013). Dasar-dasar Manajemen. In Terjemahan: & G. . Ticoalu (Eds.), *Terjemahan: G.A Ticoalu* (Issue dalam afifudin). CV. Alfabeta.
- Undang-Undang RI No 1, U. N. 1 T. 2004. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1-122.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun, Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
- Usman, H. (2013). *Manajemen : teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- UU No.15 Tahun 2004. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- UU No.15 Tahun 2006. (2006). *Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. 2, 0.
- Wijaya, C. (2017). Perilaku individu organisasi. In *Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan*. www.lpppindonesia.com